

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

April 2024 2,35 % (y-on-y),

Mei 2024 2,41 % (y-on-y),

Juni 2024 1,54 % (y-on-y).

- Pada April 2024 terjadi inflasi (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,35 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,18. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,59 % dengan IHK sebesar 106,18 dan terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,83 % dengan IHK sebesar 106,08.
- Pada Mei 2024 terjadi inflasi (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,41 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,81 % dengan IHK sebesar 105,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,55 % dengan IHK sebesar 105,98.
- Bulan Juni 2024 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan inflasi yang signifikan yang tercatat sebesar 1,54 %.
- Secara (y-on-y) Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,54 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. Inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 2,19 % dengan IHK sebesar 106,13 dan terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 0,02 % dengan IHK sebesar 104,64. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (y-on-y) pada Juni 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), daging ayam ras, gula pasir, nasi dengan lauk, sigaret kretek tangan (SKT), tarif kontrak rumah, telur ayam ras, tomat, pisang, bawang putih, tarif angkutan udara, sirih, kangkung, ayam hidup, ikan bakar, sepeda motor, cabai merah, kol putih/kubis, wortel, mie, sigaret putih mesin (SPM), bakso siap santap, biaya print, dan tarif kendaraan roda dua online
- Secara *m-to-m*, pada Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,23 % dimana terjadi penurunan harga pada 3 dari 11 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada Juni 2024, antara lain: cabai rawit, tomat, bawang merah, sawi hijau, kangkung, dan beras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m*, antara lain: ikan kembung, tarif angkutan udara, cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, dan daun singkong.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Klasifikasi permasalahan :

a. Ketersediaan pasokan :

Pola Inflasi NTT Menjelang HBKN

Beras :

- Sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, dan Jatim
- Periode hujan yang lebih pendek dari tahun lalu, sehingga ketersediaan pasokan tetap

mendapatkan perhatian.

#### Ikan-Ikanan

- Konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi maupun deflasi secara keseluruhan.

#### Hortikultura

- Komoditas hortikultura seperti tomat, cabai, dan bawang cenderung memberi andil deflasi.
- Komoditas hortikultura sayuran seperti kangkung, sawi, dan bayam sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.

#### b. Keterjangkauan harga :

- Berdasarkan pola historis dalam 6 tahun terakhir, Provinsi NTT cenderung mengalami kelangkaan komoditas-komoditas tertentu pada akhir tahun (November — Desember) hingga awal tahun (Januari — Februari). Selain, itu pada momen Ramadhan/Idulfitri dan Idul Adha, Provinsi NTT juga selalu mengalami hal yang sama. Sehingga Inflasi tertinggi dalam satu tahun cenderung terjadi pada periode Desember — Januari seiring dengan momen perayaan Natal dan Tahun baru.
- Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama inflasi di NTT sebagian besar berasal dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain beras, daging dan telur ayam ras, bawang merah dan putih, cabai merah dan rawit, ikan kembung dan tongkol. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi serta kelompok AP terutama angkutan udara.
- permasalahan yang dihadapi antara lain produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di NTT yang di bawah nasional rendah sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.

#### c. Kelancaran distribusi :

- Pemetaan menggunakan *Global Neighboring Area* untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi NTT. Wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua memiliki dampak langsung terhadap inflasi di NTT. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki dampak tidak langsung melalui perantara atau faktor lain.
- Tarif Angkutan Udara
  - Kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi utama intra provinsi
  - Maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai.

#### d. Komunikasi efektif :

- Adanya koordinasi dari berbagai stakeholder terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu namun perlu dioptimalkan.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi diantaranya:

1. Senin , 1 April 2024 : Dalam rangka Apel Siaga TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri secara hybrid di Ruang Biro PAP.
2. Rabu tgl 3 April 2024, TPID NTT melaksanakan Sidak Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Oeba, Sidak kecukupan BBM menjelang HBKN di SPBU Oeba dan Keg GPM di Kolhua yg dipimpin oleh Pj Gubernur NTT bersama Pj Walikota Kupang dan Anggota TPID Provinsi dan Kota Kupang.
3. Senin, 15 April 2024 : TPID Provinsi NTT melaksanakan RAPAT KOORDINASI dengan TPID Kota Kupang, Pengurus Pasar Kota Kupang yang tergabung dalam Perumda Pasar Kota : dalam rangka pembahasan ketersediaan stok Beras SPHP dan jadwal distribusi di Kota Kupang.
4. Jumat, 19 April 2024 : TPID Provinsi NTT melaksanakan RAPAT TEKNIS TPID Provinsi NTT dalam rangka pembahasan Pembentukan dan Penguatan Peran BUMD Pangan sebagai Offtaker di Kota Kupang. Dilaksanakan di Hotel Sasando.
5. Jumat, 19 April 2024 : Biro Perekonomian dan Bank Indonesia Provinsi NTT dan Bulog Provinsi NTT melaksanakan Pertemuan TPID Provinsi NTT ; dalam rangka pembahasan ketersediaan pasokan terutama ketersediaan Beras SPHP di NTT
6. Senin, 22 April 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara hybrid di Ruang Biro PAP.
7. Senin, 29 April 2024 : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kunjungan ke lokasi Kegiatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kantor Camat Manuban Barat, dan Pimpin oleh Pj. Bupati TTS.
8. Senin, 6 Mei 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri secara hybrid di Ruang Biro PAP.
9. Senin tgl 6 Mei 2024, melaksanakan RAPAT KOORDINASI bersama TPID Kota Kupang dan Pengurus Pasar yang tergabung dalam Perumda Pasar Kota membahas terkait penyaluran Beras SPHP di Kota Kupang dan Penyampaian HET terbaru Beras SPHP yang dikeluarkan oleh BAPANAS.
10. Senin, 13 Mei 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri secara hybrid di Ruang Biro PAP.
11. Jumat, 17 Mei 2024 : TPID Provinsi NTT melaksanakan RAPAT TEKNIS TPID Provinsi NTT dalam rangka pembahasan kenaikan harga Beras SPHP di Kabupaten TTS dan peran pengawasan dalam pendistribusian beras SPHP. Dilaksanakan di Hotel Sasando.
12. Senin, 20 Mei 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara hybrid di Ruang Kerja Asisten 2.
13. Senin, 27 Mei 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara hybrid di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi NTT.
14. Selasa, 4 Juni 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri secara hybrid di dilaksanakan di Kantor BULOG Provinsi NTT.
15. Rabu, 5 Juni 2024, TPID Provinsi NTT melaksanakan SIDAK PASAR di pasar Kasih Naikoten Kupang, dalam rangka survey harga komoditi bahan pangan.
16. Senin, 10 Juni 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang

dipimpin oleh Irjen Kemendagri secara hybrid di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov NTT.

17. Jumat, 14 Juni 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI 2024 yang dilaksanakan di Istana Negara secara hybrid dipimpin oleh Presiden RI. TPID NTT mengikuti Rakornas ini (nonton bareng) dari Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT.
18. Senin, 24 Juni 2024 : TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara hybrid di Ruang Rapat Gubernur, dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur NTT
19. Selasa, 25 Juni 2024 : Penjabat Gubernur NTT memimpin HLM-TPID Provinsi NTT diselenggarakan di Ruang Rapat Gubernur NTT, dengan Narasumber Kepala BPS NTT dan Kepala Pw BI NTT dan menghasilkan 11 butir Rekomendasi.
20. Jumat, 28 Juni 2024, TPID Provinsi NTT melaksanakan SIDAK PASAR dan PERTEMUAN RUTIN dengan pelaku/pedagang, Perumda Pasar Kota, Pemkot Kupang dan Bulog di pasar Kasih Naikoten Kupang, membahas terkait distribusi dan kelancaran beras SPHP,

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota se NTT kurun waktu Januari 2024 s/d Juni 2024 sudah sesuai (*On The Track*) sehingga tercatat perkembangan inflasi YoY Provinsi NTT ke arah yang lebih baik yaitu :
  - Bulan Januari 2024 Inflasi NTT 2,70 %,
  - Bulan Februari 2024 Inflasi NTT 3,01 %
  - Bulan Maret 2024 Inflasi NTT 1,92 %.
  - Bulan April 2024 Inflasi NTT 2,35 %
  - Bulan Mei 2024 Inflasi NTT 2,41 %
  - Bulan Juni 2024 Inflasi NTT 1,54 %

Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi tersebut tetap akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan inflasi.

2. Komoditas beras masih menjadi salah satu pemberi andil Inflasi di Provinsi NTT, namun bersamaan dengan itu progres pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan realisasi pasokan komoditas beras yaitu stok beras, khusus yang dikuasai Perum Bulog Divre NTT (Posisi Minggu Ke-4 Juni 2024) tercatat Stok beras se-NTT = 268.465,23 ton, Stok beras Kota Kupang = 10.660,65 ton dan Pengadaan dalam perjalanan 2.277,32 ton. Berdasarkan pada data sisa stok diatas disimpulkan bahwa kebutuhan pokok bisa memenuhi kebutuhan  $\pm$  2 bulan kedepan.
3. Prospek inflasi Provinsi NTT secara (*y-on-y*) pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan masih terkendali pada sekitar titik tengah kisaran target  $2,5 \pm 1$  %.
4. Inflasi pada komoditas *volatile food* diperkirakan terkendali pada sasaran 5,00 % (*y-on-y*) ditopang oleh program pengendalian inflasi jangka pendek dan menengah panjang.
5. Sepanjang bulan Januari s/d Juni 2024 telah terlaksana 295 Event GPM, Pasar Murah dan Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh :
  - Pemda Provinsi NTT (GPM = 15 Event dan Pasar Murah = 5 Event)
  - Pemda Kabupaten/Kota (GPM = 87 Event dan Pasar Murah = 112 Event).
  - Bulog se-Provinsi NTT (Operasi Pasar = 81 Event).

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi NTT adalah melakukan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Yang Efektif dan dirumuskan dalam 11 (sebelas) butir rekomendasi (*High Level Meeting* (HLM) TPID tanggal 25 Juni 2024) sebagai berikut:

1. Melaksanakan **implementasi Kebijakan Daerah** untuk Stabilisasi Harga dan Pasokan kebutuhan pokok, oleh Bank Indonesia dengan:
  - Program fasilitasi distribusi pangan berupa : PUSPA (Pusat pangan) di 5 Kota pengukuran IHK dan BILANGAN PRIMA (Mobil Pangan, Pake QRIS Makin Murah);
  - Pengembangan klaster pangan di Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, dan Nagekeo;
  - Penguatan koordinasi dan komunikasi dalam HLM TPID, *capacity building* TPID, dan GNPIP Provinsi NTT;
  - Penguatan digitalisasi data dan informasi pangan;
  - Potensi penambahan KAD dalam pemenuhan komoditas di daerah dengan Provinsi Yogyakarta (Jagung) dan Papua (Babi);
  - Kompetisi teknologi, inovasi, dan rencana bisnis - kreasi pengolahan Sumber Daya Alam melalui pemanfaatan teknologi;
2. Pemanfaatan **Dana Desa yang tepat sasaran**, melalui BUMDes untuk kegiatan pengendalian Inflasi pada aspek Ketersediaan Pasokan yang ada di 3.137 Desa di Provinsi NTT;
3. Bulog Provinsi NTT agar terus melaksanakan **penyerapan Beras Lokal** yang diproduksi oleh petani di NTT selama musim panen;
4. Meningkatkan **akses keuangan bagi pelaku usaha** Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan melalui program Kredit Merdeka oleh Bank NTT, dan Penyaluran KUR / Pembiayaan UMi oleh Bank Himbara dan Lembaga Keuangan bukan Bank;
5. Meningkatkan **akses penyaluran Beras SPHP** yang dikelola Bulog, dengan memperbanyak Mitra Bulog (Agen dan Pengecer Beras SPHP);
6. Mendorong **Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen** (berupa tanaman bahan makanan) untuk mendukung ketersediaan dan stok pangan dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun masyarakat;
7. Meningkatkan kinerja pengendalian inflasi di daerah dengan **kerja kolaboratif seluruh anggota TPID** dan stakeholder terkait, sehingga memenuhi aspek Komunikasi yang efektif;
8. Mendorong pelaksanaan **subsidi transportasi** dalam rangka ketersediaan stok, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mendorong penggunaan **Dana BTT (Bantuan Tidak Terduga)** sesuai kebutuhan apabila kondisi inflasi sudah mencapai di atas rentang sasaran  $2,5\% \pm 1$ ;
10. Mendorong **peran KADIN** Provinsi NTT sebagai mitra pelaku usaha dalam hal produksi dan pemasaran hasil panen;
11. Pembentukan **Kerjasama Antar Daerah (KAD)** dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal antar daerah.